

**PENERAPAN PRINSIP ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDALITBANG) KOTA PANGKAL PINANG**

RAFIF MUAMMAR

NPP. 30.0401

*Asdaf Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung
Program Studi Keuangan Publik*

Email: rafifmuammar@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Budget is a plan of activities carried out by management within a specific period, quantitatively expressed. Performance-based budgeting is an important approach in budgeting, where performance planning consisting of programs, activities, and performance indicators serves as the basis for assessing the success of activity implementation, programs, or policies.* **Purpose:** *This research aims to examine and explain the implementation of performance-based budgeting principles in the Regional Planning and Research Development Agency (BAPPEDALITBANG) of Pangkal Pinang City, the inhibiting factors, and the efforts made by the agency to overcome the existing obstacles.* **Method:** *This research is conducted using a qualitative descriptive research method with an inductive approach. Data/information collection is done through interview techniques, observation, and documentation. The data analysis techniques used by the researcher include data reduction, data presentation, conclusion drawing, data display, and verification.* **Result:** *The results of this research indicate that the implementation of performance-based budgeting principles in the Regional Planning and Research Development Agency (BAPPEDALITBANG) of Pangkal Pinang City has been relatively effective. However, there are still encountered challenges, and efforts have been made to overcome these obstacles according to the informants at BAPPEDALITBANG of Pangkal Pinang City.* **Conclusion:** *Some of the obstacles include a lack of integration between planning, budgeting, and performance reporting systems, insufficient available reporting data, and suboptimal implementation of research and development within the Pangkal Pinang City Government. Efforts for improvement include effective coordination to ensure that planning, budgeting, and performance reporting support each other and are well-integrated, improved coordination and communication by encouraging collaboration and information exchange between units in BAPPEDALITBANG, and enhancing their research and development capacity through strengthening teams, increasing funding allocation, and collaborating with external parties.*

Keywords: *Performance-based Implementation, Budget*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): anggaran merupakan rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode dengan penjabaran secara kuantitatif. Anggaran berbasis kinerja menjadi pendekatan yang penting dalam penyusunan anggaran, dimana perencanaan kinerja yang terdiri dari program, kegiatan, dan indikator kinerja menjadi dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, atau kebijakan. **Tujuan:** Penelitian ini untuk mengkaji dan menjelaskan Penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kota Pangkal Pinang, Faktor penghambat, dan upaya apa saja yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kota Pangkal Pinang dalam mengatasi hambatan yang ada. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, display data, serta verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Anggaran berbasis kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kota Pangkalpinang sudah terbilang efektif dalam penerapannya, tetapi masih terdapat kendala yang terjadi dan sudah ditemukan upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi menurut informan di Bappedalitbang Kota Pangkalpinang. **Kesimpulan:** Terdapat beberapa hambatan dalam, seperti, Kurangnya Integrasi Antara Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja. Kurangnya data pelaporan yang tersedia. Dan Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Upaya Peningkatan,koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja saling mendukung dan terintegrasi dengan baik. peningkatan koordinasi dan komunikasi. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan cara mendorong kolaborasi dan pertukaran informasi antara unit-unit kerja di Bappedalitbang.meningkatkan kapasitas litbang mereka melalui penguatan tim, peningkatan alokasi dana, dan kerja sama dengan pihak eksternal.

Kata Kunci :Penerapan Berbasis Kinerja, Anggaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran merupakan alat alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas perekonomian dalam konteks kehidupan bernegara. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Anggaran berbasis kinerja mengacu pada perencanaan kinerja, program, dan kegiatan dengan indikator yang ingin dicapai. Efisiensi dalam penyusunan anggaran diharapkan tercapai. Pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Otonomi daerah membawa perubahan dalam sistem keuangan dan akuntansi pemerintah daerah menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Transparansi memastikan hak dan akses yang sama bagi masyarakat dalam mengetahui

proses anggaran, karena melibatkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan penerapan anggaran berbasis kinerja untuk menciptakan transparansi dan good governance. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.02/2005 menjadi pedoman operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. RKA-KL digunakan untuk menyusun anggaran yang mencerminkan indikator kinerja yang terukur. Evaluasi kinerja instansi negara berdasarkan anggaran dapat mengungkap apakah anggaran telah memberikan hasil maksimal. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dengan mencakup penyusunan RKASKPD. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 memberikan petunjuk teknis terkait perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dan Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan reformasi manajemen keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang mengatur keuangan daerah. Undang-undang yang mengatur keuangan daerah telah mengubah sistem akuntabilitas pemerintah daerah dari vertikal (kepada pemerintah pusat) menjadi horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Konsep kinerja atau performance menjadi ukuran bagi karyawan dalam melaksanakan tugas yang ditargetkan kepada mereka, sehingga penilaian kinerja dalam sebuah organisasi menjadi hal yang penting. Aspek keuangan, terutama anggaran berbasis kinerja, menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian kinerja instansi pemerintah. Untuk dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja, instansi pemerintah perlu memiliki perencanaan strategis yang melibatkan semua komponen dalam pemerintahan. Dengan membangun sistem penganggaran yang mengintegrasikan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan, akan terlihat keterkaitan antara alokasi dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam menghadapi tuntutan masyarakat memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Kurangnya kompetensi pengelola keuangan dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja dapat menjadi hambatan dalam implementasinya. Hal ini dapat berdampak pada keterlambatan pengesahan APBD. Sebagai upaya menjalankan otonomi daerah, BAPPEDALITBANG Kota Pangkal Pinang telah menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dalam penyusunan anggaran di setiap unit penggunaan anggaran. Pendekatan ini membuat strategi organisasi menjadi lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Program-program yang disusun oleh BAPPEDALITBANG Kota Pangkal Pinang sesuai dengan prioritas RPJMD dan dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang terukur. Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja

di BAPPEDALITBANG Kota Pangkal Pinang menitikberatkan pada tujuan kegiatan yang harus mencakup semua langkah dalam menyusun anggaran.

Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDALITBANG Kota Pangkal Pinang menyebutkan perolehan capaian kinerja terhadap sasaran selama tahun 2021 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian yang berhasil. Kegiatan pembangunan BAPPEDALITBANG terdiri dari 5 sasaran dengan 12 program yang mencakup 56 kegiatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDALITBANG Kota Pangkal Pinang menyebutkan perolehan capaian kinerja terhadap sasaran selama tahun 2021 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian yang kurang berhasil. Kegiatan pembangunan BAPPEDALITBANG terdiri dari 5 sasaran dengan 12 program yang mencakup 56 kegiatan. Salah satu fenomena lain adalah rendahnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Menurut data yang dilaporkan, pada bulan Agustus 2022, realisasi APBD untuk semester satu di wilayah Kota Pangkal Pinang hanya mencapai 53,65% dari target yang direncanakan. Beberapa faktor penyebab rendahnya realisasi di Pangkal Pinang ini termasuk keterlambatan pengajuan anggaran melewati batas waktu yang ditentukan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama oleh Refika Onesis (2022) “Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah”. Penelitian kedua oleh Masnawati (2015) “Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Balai Diklat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wilayah V Makassar di Makassar”. Penelitian selanjutnya oleh Varrel Ifram Sham (2022) “Analisis Penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan. Selanjutnya oleh Risma Hilmawati (2018) “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 dan 2015”. selanjutnya, Anita Wahyu Wiyajanti,dkk “Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan”

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai pelaksanaan PENERAPAN PRINSIP ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDALITBANG) KOTA PANGKAL PINANG, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni teori Penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja menurut Halim dan Iqbal,(2012:174)

1.5. Tujuan.

Penelitian ini untuk mengkaji dan menjelaskan Penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kota Pangkal Pinang. Penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan faktor penghambat Penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kota Pangkal Pinang. Penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kota Pangkal Pinang dalam mengatasi hambatan yang ada.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan Penelitian kualitatif menurut Creswell yang sudah diterjemahkan, penelitian dengan metode kualitatif adalah dengan mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda. Adapun informan penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* terdiri atas Kepala Bappedalitbang Kota Pangkalpinang, Bendahara Bappedalitbang Kota Pangkalpinang, dan Kepala Bidang Bappedalitbang. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan teori Penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja menurut Halim dan Iqbal. Penelitian ini dilakukan di Bappedalitbang Kota Pangkalpinang

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis pelaksanaan Sistem *Smart planning budgeting* dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori pelaksanaan menurut Rohman dan akuntabilitas keuangan Menurut Chabib Sholeh dan Rohcmansjah Heru. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

1. Ketepatan Waktu Laporan

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, Dengan adanya pelaporan melalui LAKIP dan LKPJ, instansi pemerintah tersebut dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerjanya. Pelaporan ini juga memberikan informasi yang berguna dalam mengevaluasi rencana anggaran ke depan agar sesuai dengan hasil realisasi kinerja sebelumnya.

2. Pencapaian Kinerja

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, Pencapaian kinerja dalam transparansi dan akuntabilitas anggaran oleh BAPPEDALITBANG Kota Pangkalpinang, berikut adalah beberapa kemungkinan pencapaian yang dapat disorot. Pencapaian kinerja pada Bappedalitbang Kota Pangkalpinang sudah sesuai dengan keinginan dan respon masyarakat sudah positif terhadap pencapaian dari transparansi dan akuntabilitas anggaran di Bappedalitbang Kota Pangkalpinang. Namun, ada permasalahan internatl di Bappedalitbang kota Pangkalpinang itu sendiri, yaitu

kurangnya data tersedia pada pelaporan kerjanya dan menghambat proses pengharapan kerjanya yang lebih baik kedepannya.

3.2. Disiplin Anggaran

1. *Trajectory Anggaran*

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, Bappedalitbang Kota Pangkalpinang telah menunjukkan tingkat kedisiplinan yang memadai dalam pengelolaan anggaran. Hal ini terlihat dari pencapaian sasaran strategis Bappeda Litbang Kota Pangkalpinang tahun 2021 sebesar 87,8%. Data yang disajikan menunjukkan bahwa kinerja Bappedalitbang Kota Pangkalpinang telah mencapai tingkat keberhasilan, meskipun masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya tercapai.

3.3. Keadilan Anggaran

1. Anggaran Berdasarkan Kebutuhan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan Pada Aspek Keadilan Anggaran pada penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Bappedalitbang Kota Pangkal Pinang telah berjalan dengan baik dimana dibuktikan dengan adanya penyusunan dan pemberian anggaran terhadap unit kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan yang dilihat dari capaian kerjanya.

3.4. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

1. Perbandingan, Perencanaan dan Evaluasi

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan Pada Aspek Efektivitas dan Efisiensi Anggaran pada penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Bappedalitbang Kota Pangkal Pinang telah berjalan dengan baik dimana dibuktikan dengan adanya penyusunan dan pemberian anggaran dilaksanakan dengan melakukan perbandingan hasil perencanaan dan realisasi kinerja yang tercapai pada periode sebelumnya sehingga anggaran untuk tahun berikutnya sudah tepat sasaran dan sesuai dengankinerja yang akan dilakukan.

3.5 Disusun dengan Pendekatan Kinerja

1. *Resource Forum* dan *outpur* aktivitas

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan Pada Aspek Disusun dengan Pendekatan Kinerja pada penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Bappedalitbang Kota Pangkal Pinang telah berjalan dengan baik dimana dibuktikan dengan adanya penyusunan yang mempertimbangkan hasil *resource forum* untuk memastikan *output* yang mampu dikeluarkan dan realisasi kinerja nantinya akan optimal.

3.4. Hambatan Dalam Pelaksanaan *Smart planning budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Kurangnya Integrasi Antara Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja
- b. Kurangnya data pelaporan yang tersedia.
- c. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan anggaran di lingkungan Bappedalitbang kota Pangkalpinang

3.6. Upaya Yang Dilakukan Yang Dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan *Smart planning budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kurangnya Integrasi Antara Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja.

salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara unit-unit terkait di dalam organisasi sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Dengan adanya upaya meningkatkan komunikasi dan kerjasama ini, diharapkan organisasi dapat mengatasi hambatan kurangnya integrasi antara sistem-sistem tersebut dan mencapai kinerja yang lebih maksimal secara keseluruhan.

b. kurangnya data pelaporan kinerja

Dengan adanya peningkatan kolaborasi, pertukaran informasi, dan integrasi data, Bappedalitbang berharap dapat mengatasi kendala yang dihadapi sebelumnya, seperti kesulitan dalam berbagi dan mengintegrasikan data antara unit-unit kerja. Dengan demikian, diharapkan bahwa perbaikan ini akan menghasilkan akses yang lebih baik terhadap data yang relevan, yang pada akhirnya akan mendukung Penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja secara lebih efektif

c. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dalam proses perencanaan anggaran itu sendiri. Hal yang kami lakukan adalah memberikan sanksi bagi karyawan yang lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini bertujuan agar pegawai lebih teliti dan selektif dalam bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal lain yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kota Pangkalpinang ialah melakukan pengkajian ulang terhadap kegiatan yang direncanakan namun memiliki hasil yang terlaksana belum maksimal.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Bahwa penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kota Pangkalpinang telah terbukti efektif. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, dan upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut berdasarkan informasi dari BAPPEDALITBANG Kota Pangkalpinang. Ditemukan bahwa hambatan dalam penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja di BAPPEDALITBANG Kota Pangkalpinang meliputi kurangnya integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, kurangnya ketersediaan data pelaporan, serta belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Untuk meningkatkan penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja, telah diajukan beberapa upaya. Salah satunya adalah meningkatkan koordinasi yang efektif antara bagian-bagian terkait untuk memastikan keselarasan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi antara unit kerja di BAPPEDALITBANG serta peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan melalui penguatan tim, peningkatan alokasi dana, dan kerja sama dengan pihak

eksternal. tantangan dalam penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja di BAPPEDALITBANG Kota Pangkalpinang dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kota Pangkalpinang efektif, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi. Upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut menurut informan di BAPPEDALITBANG Kota Pangkalpinang.

Hambatan yang ditemukan dalam penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja di BAPPEDALITBANG Kota Pangkalpinang meliputi kurangnya integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, kurangnya data pelaporan yang tersedia, dan belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Untuk meningkatkan penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja di BAPPEDALITBANG Kota Pangkalpinang, beberapa upaya telah disarankan. Pertama, diperlukan koordinasi yang efektif untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Kedua, perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan mendorong kolaborasi dan pertukaran informasi antara unit-unit kerja di BAPPEDALITBANG. Ketiga, kapasitas penelitian dan pengembangan harus ditingkatkan melalui penguatan tim, peningkatan alokasi dana, dan kerja sama dengan pihak eksternal. Berdasarkan kesimpulan dan saran di atas, beberapa rekomendasi dapat disampaikan. Pertama, implementasikan saran-saran tersebut untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja dan meningkatkan efektivitas serta hasil kinerja dalam pembangunan dan penelitian pengembangan daerah. Kedua, upayakan peningkatan kualitas dan ketersediaan data pelaporan yang relevan untuk penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja. Ketiga, tingkatkan penerapan penelitian dan pengembangan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan BAPPEDALITBANG Kota Pangkalpinang dapat mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas serta hasil kinerja dalam pembangunan dan penelitian pengembangan daerah..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan pegawai di Badan Pengembangan dan Penelitian Kota Pangkalpinang untuk mengizinkan saya melaksanakan penelitian dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Iqbal, (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen : Yogyakarta
- Hansen, Mowen. (2000). Manajemen Biaya. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi., dkk. (2010).
Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Kumpulan Undang-Undang tentang APBN.
Jakarta: Kemenkeu.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Waworuntu, Tika Sari Sandra.
(2013). "Evaluasi Penyusunan Anggaran
- Onesis, Rafika (2022) Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu.
- Masnawati (2015) Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Balai Diklat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wilayah V Makassar di Makassar, Sulawesi Selatan
- Varrel Ifram Sham (2022) Analisis Penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
- Risma Hilmawati (2018) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 dan 2015. DKI Jakarta
- Wiyajanti A.W,dkk (2020) Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur